

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA PALERAN KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER

Kuni Nabila¹, Pudjo Suharso¹, Wiwin Hartanto¹

¹Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember
e-mail: nabila22mukti@gmail.com

Abstrak

Pangan menjadi salah satu hak asasi manusia sebagai komponen dasar demi mewujudkan sumber daya yang bermanfaat hal tersebut sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Temuan Rohana Haryanto (2019) melalui efektifitas Bantuan Pangan Non Tunai di Palembang dengan hasil bahwa program tersebut dapat berjalan cukup baik. Program BPNT dirancang sebagai cara pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan nilai gizi kepada keluarga penerima manfaat yang seimbang serta penyalurannya melalui non tunai dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kebijakan dengan tujuan memudahkan mengontrol, mengawasi serta meminimalisir kesenjangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program BPNT yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember, dengan penelitian kualitatif jenis penelitian deskriptif. Staf Tim Koordinasi Program BPNT di Dinas Sosial Keluarga penerima Manfaat (KPM) di Desa Paleran sebagai Subjek penelitian ini. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPNT di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember belum sesuai dengan buku pedoman BPNT 2018 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, dengan beberapa tahap, sosialisasi, registrasi, penyaluran dan pembayaran. Terdapat masalah pada tahapan implementasi program, pada tahap sosialisasi belum terlaksana dengan baik mengakibatkan adanya *miss communication* antara pemerintah dan masyarakat, waktu penerimaan sembako yang tidak tepat waktu, kartu kombo yang tidak dapat dicairkan sedangkan di data pemerintah masih menjadi penerima aktif, jumlah sembako yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan pemerintah yaitu Rp110.000,00, pengambilan bantuan yang diwakilkan oleh sanak saudara atau tetangga. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut terdiri dari, komunikasi kepada masyarakat, sumberdaya yang tersedia dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan program.

Kata Kunci : Implementasi, Program BPNT, KPM

PENDAHULUAN

Pangan menjadi salah satu hak asasi manusia sebagai komponen dasar demi mewujudkan sumber daya yang bermanfaat hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi pemerintah Indonesia melaksanakan subsidi beras untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dan mengurangi beban rumah tangga miskin melalui program Beras Sejahtera (Rastra) dengan tujuan untuk membantu ketahanan pangan masyarakat berpenghasilan rendah (BULOG, 2017). Program beras sejahtera (Rastra) merupakan pelaksanaan dari instruksi presiden tentang pemberantasan kemiskinan nasional. Supaya efektivitas dan tepat sasaran pelaksanaan program subsidi Rastra, pemerintah menetapkan pada tanggal 16 april 2016 melalui rapat terbatas tentang keuangan bahwa penyaluran bantuan sosial dan subsidi beralih menjadi non tunai yang pelaksanaannya baru dilaksanakan pada tahun 2018 melalui kupon elektronik (*e-voucher*) (Pedoman Umum BPNT, 2018), penyaluran yang mengalami transformasi kebijakan subsidi menjadi non tunai dengan tujuan agar tepat sasaran dan mudah dipantau (Kemensos, 2017), hal tersebut juga semakin dipertegas bahwa penyaluran bantuan sosial melalui bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana melalui dana melalui kartu ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) no 63 tahun 2017.

Penelitian telah dilakukan Rohana Haryanto (2019) melalui efektifitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Palembang dan hasilnya bahwa Program BPNT di Palembang dapat berjalan cukup baik. Salah satu program yang menentukan keberhasilan suatu program adalah Penelitian implementasi suatu program, karena pada implementasi, kemungkinan akan terjadi masalah-masalah yang muncul.

Program BPNT telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dengan sasaran seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Jember dengan melalui beberapa tahapan yang mengacu pada petunjuk Buku Pedoman BPNT 2018.

Selama observasi di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Dari sejumlah data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Jember diketahui terdapat KPM yang belum mendapatkan *e-voucher*, KPM tersebut masih ada (hidup), tidak melakukan pindah tempat tinggal, dan sebagian besar masyarakat kurang paham mengenai BPNT, terbukti masih banyak masyarakat yang menganggap pemberian sembako BPNT itu sama setiap bulannya, padahal dalam panduan BPNT Umum menjelaskan bahwa Pemerintah memberikan BPNT tersebut senilai Rp110.000,00-/KPM setiap bulannya melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah, di Kabupaten Jember melalui Bank BNI yang disalurkan ke toko-toko terdekat yang telah ditentukan oleh pemerintah (*E-Warung*), dengan jumlah Rp110.000,00- masyarakat bisa mendapatkan barang sembako melalui menukarkan *e-voucher* kepada *e-warung* yang terdekat dengan tempat tinggal, akan tetapi keputusan dari Bupati Kabupaten Jember bahwa sembako yang diberikan berupa beras, telur, serta kacang-kacangan sedangkan harga telur dan beras mengalami naik turun sehingga bantuan yang diperoleh oleh masyarakat juga berubah-ubah jumlahnya setiap bulannya, masyarakat kurang mengetahui kebijakan program BPNT.

Menurut Gordon dalam Pasolong (2010:58) dalam konsep Implementasi Kebijakan adalah semua aktivitas yang diarahkan kepada realisasi program. Sedangkan, indikator-indikator kinerja ini mengukur seberapa jauh ukuran dasar dan tujuan kebijakan dapat direalisasikan sedangkan Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012) dalam pelaksanaan studi implementasi kebijakan publik tujuan dan sasaran harus diidentifikasi dan diukur, sebab implementasi akan terealisasi jika tujuan kebijakan terlaksana dan berhasil.

Menurut Anderson dalam Muchlis (2014:36) kebijakan publik merupakan kebijakan yang ditetapkan pejabat atau lembaga pemerintah, dan terdapat lima konsep dan implikasi kebijakan publik yaitu, pertama kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang sesuai tujuan, kedua kebijakan publik yang berisikan rangkaian tindakan yang diambil berdasarkan sepanjang waktu, ketiga kebijakan publik adalah tanggapan dari suatu kebutuhan sehingga akan munculnya kebijakan, keempat kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan nyata pemerintah, bukan hanya sekedar keinginan dan rencana yang akan dilaksanakan. Menurut George c Edward III (1980) dalam Leo Agustino (2014:149) ada empat variabel yang bisa berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu; sumberdaya, komunikasi, disposisi, dan struktur Birokrasi.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian yang dideskripsikan dengan menggunakan bahasa dan kata-kata (Moleong, 2012: 6). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial dan di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Penentuan informan penelitian dengan *snowball sampling*, staff koordinasi Program BPNT sebagai informan utama dan masyarakat penerima program BPNT di Desa Paleran kecamatan Umbulsari sebagai informan tambahan, hal tersebut sesuai pendapat Bungin, 2007:78 bahwa Informan penelitian merupakan subjek yang paham informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumen. Data yang sudah didapatkan dalam penelitian kemudian dianalisis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, data *Display*, dan penarikan kesimpulan (Yusuf, 2017:407).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Sosialisasi

Sosialisasi Program BPNT dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program BPNT Dinas Sosial dibantu Staf Desa Paleran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Paleran. Sosialisasi dilaksanakan secara langsung dan bertempat di Balai Desa Paleran. Informasi yang disampaikan oleh pelaksana kepada KPM sesuai petunjuk pelaksanaan program BPNT 2018.

2. Registrasi

Bank penyalur menjadi penanggung jawab pada Proses registrasi yang dilaksanakan bersamaan dengan tahap registrasi, pada tahap registrasi hanya KPM BPNT non PKH yang melakukan pembukaan rekening sedangkan KPM yang mendapatkan Program PKH tidak perlu melakukan pembukaan rekening lagi untuk mendapatkan kartu kombo karena kartu kombo yang digunakan untuk mengambil bantuan Program BPNT dan PKH sama.

3. Penyaluran

Pada proses penyaluran mengalami masalah-masalah yang tidak sesuai dengan Buku Pedoman BPNT 2018 sebagai acuan pelaksanaan program. Diantara masalah-masalah yang muncul pada proses penyaluran yaitu waktu pengambilan bantuan yang di terima KPM BPNT di Desa Paleran tidak tepat waktu, terdapat KPM yang tidak bisa mendapatkan bantuan akibat kartu kombo yang tidak dapat dicairkan, sedangkan nama KPM tersebut terdaftar penerima aktif di Data Dinas Sosial, dan jumlah sembako yang diterima KPM tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan pemerintah yaitu Rp110.000,00.

4. Pembayaran

Pelaksanaan Program BPNT di Desa Paleran pada tahap pembayaran mengalami masalah yaitu terdapat KPM BPNT di Desa Paleran yang pengambilan bantuan yang diwakilkan ke sanak saudara dan tetangga akibat mengalami kesulitan dalam menggunakan kartu kombo.

b. Faktor- faktor Implementasi Program BPNT

1. Komunikasi

Pelaksanaan sosialisasi program BPNT yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan dibantu Staf Desa paleran telah dilaksanakan di Balai Desa Paleran, para penerima bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat sebagai sasaran. Informasi yang di sampaikan pada sosialisasi adalah mekanisme pelaksanaan program BPNT cukup baik. Informasi yang diberikan tidak berubah-ubah, namun penyampaian informasi masih kurang jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban beberapa KPM BPNT di Desa Paleran bahwa KPM tersebut masih kurang faham dengan Program BPNT. Hambatan pada penyampaian informasi yaitu informasi yang disampaikan kurang jelas karena menggunakan bahasa yang sulit dipahami masyarakat serta latar belakang pendidikan yang sebagian besar sekolah dasar menjadi penghambat dalam proses penyampaian informasi.

2. Sumberdaya

Sumberdaya dari segi fasilitas yang tersedia dan digunakan dalam pelaksanaan program BPNT sudah memadai. Fasilitas E-Warong yang tersedia di Desa Paleran sudah sesuai dengan Buku Pedoman BPNT 2018. Sedangkan sumber Daya Manusia (SDM) pelaksanaan BPNT oleh

Dinas Sosial Kabupaten Jember sudah memadai karena pada pelaksanaan program BPNT tidak membutuhkan sumber daya Manusia yang banyak tetapi membutuhkan SDM yang berkualitas sesuai dengan bidang yang diperlukan pada pelaksanaan program BPNT seperti Bank Penyalur dan E-warong.

3. Disposisi

Respon pelaksana dari Dinas Sosial Kabupaten Jember terhadap Program BPNT cukup baik, pelaksana menyatakan bahwa program BPNT merupakan program yang sangat penting bagi masyarakat penerima bantuan. Dan respon masyarakat penerima bantuan cukup baik terhadap pelaksanaan program BPNT. Masyarakat menyatakan bahwa program BPNT cukup baik, kualitas sembako yang diterima cukup baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada Program BPNT cukup baik dan sudah sesuai dengan Buku Pedoman BPNT 2018 sebagai acuan dalam pelaksanaan program BPNT, hal tersebut terbukti ketika saat peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Jember terdapat KPM yang melaporkan terkait kartu kombo yang tidak bisa dicairkan. Staff Koordinasi Program BPNT langsung menghubungi pihak Bank Penyalur terkait kartu kombo yang tidak bisa dicairkan dan pihak Staf Dinas Sosial memberitahu terkait kartu kombo yang tidak bisa dicairkan .

Pembahasan

a. Implementasi Program BPNT di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari

Pelaksanaan tahapan Program BPNT di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember secara umum di lapangan telah sesuai dengan Buku Pedoman Program BPNT 2018, yaitu diawali tahapan sosialisasi, registrasi, penyaluran sampai pada tahapan pembayaran. Sosialisasi telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dibantu oleh Staff Desa Paleran dalam terlaksananya Program BPNT dengan lancar yang dikhususkan kepada KPM. secara umum masyarakat yang menerima bantuan sudah mengetahui adanya Program yang membantu pengeluaran masyarakat miskin dalam pembelian sembako, namun masyarakat belum mengetahui nama Program yang telah membantu meringankan pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kehidupan sehari-hari yaitu Program BPNT. Masyarakat di Desa Paleran juga kurang faham mengenai mekanisme Program BPNT, hal tersebut dapat dilihat dari jawaban masyarakat dari hasil wawancara.

Menurut George Edwards III dalam Winarno (2012:178) dalam komunikasi kebijakan, penyampaian informasi kebijakan kepada implementor, sasaran penerima program, dan pihak yang bersangkutan harus jelas sehingga diantara mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien karena mereka mengetahui maksud, tujuan, sasaran serta substansi dan kebijakan publik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka sosialisasi Program BPNT yang dilaksanakan Dinas Sosial dan staf Desa Paleran belum tercapai dengan tujuan.

Tahap registrasi di Desa Paleran juga dilaksanakan bersamaan dengan tahapan sosialisasi, pada tahapan Registrasi tidak membutuhkan Staff banyak. Namun pada tahapan registrasi yang bertanggung jawab yaitu Bank penyalur. Namun untuk membantu terlaksananya tahap registrasi dengan lancar, staf Desa Paleran ikut membantu dalam terlaksananya Program BPNT, dengan memberitahu undangan kepada KPM BPNT di Desa Paleran untuk mengikuti sosialisasi mengenai mekanisme Program BPNT, pada tahap registrasi dilakukan pembukaan rekening buku tabungan KPM yang menerima bantuan BPNT yang Non PKH, sedangkan KPM yang menerima bantuan

PKH dan BPNT tidak perlu melakukan pembukaan rekening karena kartu kombo yang digunakan pada kedua program tersebut sama. Sehingga pelaksanaan registrasi di desa Paleran hanya dilakukan pada 359 KPM dari total keseluruhan total jumlah KPM bpnt 1064 KPM, sedangkan 705 KPM tidak perlu melaksanakan tahap registrasi karena sudah memiliki kartu kombo yang digunakan dalam pengambilan bantuan.

Tahap penyaluran di Desa Paleran mengalami masalah, diantara masalah yang muncul dalam pelaksanaan program BPNT yaitu waktu penyaluran yang tidak menentu, hal tersebut tidak sesuai dengan Buku Pedoman BPNT 2018 yang menyatakan bahwa proses penyaluran dana dari pemerintah pada tanggal 25 sedangkan di lapangan proses penyaluran dana untuk mendapatkan bantuan tidak menentu. Masalah yang lain terdapat KPM yang tidak bisa mendapatkan bantuan sedangkan nama KPM tersebut di Dinas Sosial masih terdata penerima Bantuan secara aktif. Masalah selanjutnya yang terdapat pada tahapan penyaluran yaitu jumlah bantuan sembako yang tidak sesuai dengan jumlah dana yang dianggarkan oleh pemerintah hal tersebut diketahui dari membandingkan hasil wawancara dengan KPM BPNT dengan harga sembako di E-Warong. Pada hasil wawancara KPM BPNT : “bulan kemarin beras 10 kg dengan telur kg”(SA). Sedangkan peneliti pada bulan kemarin melihat harga normal sembako beras ditoko yang sama dengan pengambilan bantuan harganya Rp8500,00/1 kg dengan kualitas yang sama di terima KPM BPNT sedangkan harga telur kg = Rp6000,00 sehingga jika dijumlah 10 kg dengan telur kg hanya Rp91.000,00 tidak sesuai dengan dana anggaran yang pemerintah berikan yaitu Rp110.000,00. E-Warong mengambil keuntungan lebih dari anggaran tersebut hal tersebut tidak sesuai dengan Buku Pedoman BPNT karena jumlah sembako yang di terima KPM sesuai anggaran Rp110.000,00 dengan menyesuaikan harga yang berlaku di E-warong.

b. Faktor-faktor implementasi Program BPNT di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program menurut George Edwards III dalam Winarno (2012:177-210) sebagai berikut:

1. Komunikasi merupakan penyampaian informasi yang dilaksanakan pada proses sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Staf Koordinasi Program BPNT dari Dinas Sosial Kabupaten Jember dan Staff Desa Paleran kepada masyarakat penerima manfaat atau Keluarga Penerima Manfaat Desa Paleran, hal tersebut sesuai yang dikemukakan Edwards bahwa kebijakan publik harus disampaikan kepada semua pihak-pihak yang terlibat bukan hanya kepada pelaksana kebijakan namun juga disampaikan kepada sasaran penerima manfaat. Pemberian informasi yang disampaikan juga harus konsisten agar tidak membingungkan masyarakat, dilapangan informasi yang diberikan implementator sudah konsisten namun penyampaian informasi yang diberikan kepada KPM BPNT di Desa Paleran belum tercapai. Masyarakat masih bingung mengenai mekanisme pelaksanaan program BPNT hal tersebut terjadi akibat bahasa yang digunakan implementator sulit dipahami oleh masyarakat serta latar belakang pendidikan KPM yang sebagian besar Sekolah Dasar.
2. Sumberdaya yang digunakan pada pelaksanaan program BPNT di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yaitu: SDM yang berada di Dinas Sosial sudah memadai, karena sudah dibagi tugas masing-masing dalam melaksanakan kewajibannya dan Staff Koordinasi Program BPNT juga sudah memadai. Memang dalam pelaksanaan program BPNT tidak membutuhkan staff banyak karena program BPNT penyalurannya tidak secara langsung, namun membutuhkan staff yang ahli pada bidang-bidang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program BPNT seperti Bank Penyalur. Fasilitas yang terdapat di Desa Paleran berupa *e-warong*

juga sudah memadai serta jarak *e-warong* dengan tempat tinggal KPM yang dekat hal tersebut sudah sesuai Buku Pedoman Program BPNT 2018.

3. Disposisi dilihat dari sisi respon pelaksana program BPNT sangat mendukung dengan diadakannya program tersebut. Sikap pelaksana tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program sesuai yang dikemukakan Edwards dalam Winarno (2012:197) bahwa pentingnya karakter pelaksanaan program terhadap suatu kebijakan, berarti adanya dukungan dan kemungkinan besar melaksanakan kebijakan sesuai dengan pedoman, dan Dinas Sosial Kabupaten Jember melaksanakan program BPNT sesuai dengan tugas dan kewajibannya serta petunjuk dalam pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Disposisi dilihat dari sisi respon masyarakat pada program BPNT sebagian masyarakat memberikan respon positif terhadap program BPNT yang membantu meringankan pengeluaran masyarakat serta kualitas sembako yang diterima masyarakat jauh lebih bagus dibandingkan dengan kualitas sembako yang diterima dari program sebelumnya, dan sebagian masyarakat kurang puas terhadap pelayanan program BPNT yang dianggap tidak konsisten dalam jumlah dan jenis sembako yang diberikan serta lambatnya pelayanan implementator ketika masyarakat mengadu adanya masalah seperti kartu kombo yang tidak bisa dicairkan.

4. Struktur Birokrasi. Pelaksanaan Program BPNT di Desa Paleran telah dilaksanakan dengan Buku Pedoman BPNT sebagai pedoman, serta sudah ada pembagian tugas pada masing-masing bidang, hal tersebut sesuai dengan pendapat Winarno (2012: 208) bahwa pembagian wewenang dan sumber dasar untuk melaksanakan kebijakan yang utuh dibutuhkan koordinasi. Dinas Sosial sudah memiliki tugas menangani mekanisme pelaksanaan program BPNT dan terdapat Staf khusus yang menangani program tersebut yaitu Tim Koordinasi Program BPNT. Tim Koordinasi Program BPNT bertanggung jawab Pada pelaksanaan program BPNT, dan koordinasi yang berjalan cukup baik hal tersebut terlihat ketika terdapat masyarakat mengadu permasalahan yang terjadi, Tim Koordinasi Program BPNT langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

PENUTUP

Implementasi Program BPNT di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember belum sesuai dengan buku pedoman BPNT tahun 2018. Pada proses sosialisasi informasi yang diberikan kepada masyarakat kurang jelas, bahasa yang sulit dimengerti yang digunakan pada saat memberikan informasi akibatnya terjadi *miscommunication* antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat kurang mengetahui program BPNT mulai dari jumlah dan jenis bantuan yang didapatkan setiap bulannya.

Pada proses penyaluran terdapat masalah terdapat kartu yang tidak bisa dicairkan sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan, sedangkan nama KPM yang kartu kombo yang tidak bisa dicairkan masih tercatat penerima aktif bantuan, waktu pengambilan yang tidak menentu, jumlah bantuan yang tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan pemerintah yaitu Rp110.000,00. Pada proses pembayaran terdapat kendala KPM yang pengambilannya masih diwakilkan hal tersebut terjadi akibat latar belakang pendidikan penerima bantuan yang lulusan Sekolah Dasar

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Pres.
- Haryanto, R. 2019. *efektifitas Bantuan Pangan Non Tunai di Palembang*
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Pasolong, H. 2012. *Metode Penelitian administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2018. *Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2018*. Jakarta: Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik* (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta:CAPS.

Yusuf, M. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan. Edisi Pertama*. Jakarta : Kencana.